

## PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

**Mohammad Alfen Tadjudinsyah**

*moch.alfentadjudinsyah@gmail.com*

**Astri Fitria**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of the implementation of public accounting and internal auditing on the performance of local government institutions at RSUD Dr. Soetomo Surabaya. The research was casual-associative with a quantitative approach. This kind of research aimed to find out whether or not the effect or relationships among independent variables on the dependent variable. The data source were primary with questionnaires as the instrument. Furthermore, the population was employees who worked at RSUD Dr. Soetomo Surabaya which in accounting and asset, SPI, and regram. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 30 samples. The data analysis technique used multiple linear regression. As the result it showed that 1) Public Accounting had a positive effect on the performance of local government institutions, and 2) Internal Auditing had a positive effect on the performance of local government institutions. It meant that the better the public accounting was, the increase the performance of local government institutions would be in addition, the better the internal auditing was the incline the performance of local government institutions would be.*

*Keywords: public accounting, internal auditing, local government institutions*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada rsud Dr. Soetomo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data adalah data primer menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota bagian akuntansi aset, spi, dan regram dengan sampel sebanyak 30 orang yang diambil dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Objek yang digunakan adalah pegawai yang bekerja di RSUD Dr. Soetomo Kota Surabaya yang bertempat pada bagian akuntansi dan aset, SPI, regram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. 2) Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Artinya bahwa apabila semakin baik Akuntansi Sektor Publik maka cenderung meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan semakin baik pengawasan internal maka cenderung meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: akuntansi sektor publik, pengawas internal, kinerja instansi pemerintah daerah

### PENDAHULUAN

Rumah sakit umum daerah sebagai salah satu instansi pemerintah harus mampu memberikan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Pemerintah daerah menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Provinsi) dan akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting yang sangat strategis dalam membuat upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup kesehatan

masyarakat dengan biaya terjangkau dilakukan pemerintah daerah dengan cara continuous improvement perbaikan secara berkala atau terus menerus baik dibidang pelayanan, administrasi, teknologi kesehatan, melengkapi sarana dan prasarana, program asuransi kesehatan keluarga dan sebagainya.

Kualitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Soetomo pada tahun 2015 sampai 2018 mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya RSUD Dr. Soetomo sebagai rujukan tertinggi dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan maka kemampuan RSUD Dr. Soetomo dalam memberikan pelayanan harus bisa diandalkan. Untuk itu maka RSUD Dr. Soetomo harus memberikan pelayanan secara bermutu. Pelayanan Rumah sakit yang bermutu adalah pelayanan yang aman, rasional efektif, efisien (murah) dan memberikan kenyamanan bagi pasien. Kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang bermutu tersebut menjadi semakin penting bagi RSUD Dr. Soetomo karena perannya sebagai rumah pendidikan. Tetapi, masih terdapat beberapa faktor kelemahan yang akan menghambat optimalisasi peningkatan derajat kesehatan untuk lima tahun kedepan. Diantaranya adalah orientasi kualitas pelayanan belum berdasarkan customer, serta kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Salah satu kunci pokok keberhasilan pembangunan kesehatan adalah kualitas sumberdaya manusia. Penguatan sumber daya manusia kesehatan bertujuan untuk memaksimalkan sumber-sumber daya lainnya (sarana dan prasarana). Dalam pembangunan kesehatan diperlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang mampu dan mau melaksanakan upaya kesehatan dengan paradigma sehat dan mengutamakan transparansi dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Akuntansi Sektor Publik sendiri merupakan sebuah entitas yang berbeda dan unik karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Menurut Bastian (2014:2) Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Karena itu dapat dinyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable* dalam rangka pengelolaan dana secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan bisa disebut juga dengan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja RSUD Dr. Soetomo oleh Biro organisasi menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terkait capaian nilai SIKAP Tahun 2015-2018 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Capaian Nilai Sikap**

Nilai SIKAP	2015	2016	2017	2018
a) Perencanaan kinerja 30%	28,49	27,15	27,31	27,56
b) Pengukuran kinerja 25%	17,54	21,56	21,56	21,56
c) Pelaporan kinerja 15%	12,00	12,31	12,31	12,31
d) Evaluasi Kinerja 10%	7,67	7,43	7,64	7,43
e) Pencapaian Kinerja 20 %	14,64	14,41	14,41	14,41
Nilai hasil evaluasi 100%	80,34	82,86	83,23	83,27
Tingkat akuntabilitas kinerja	A	A	A	A
	(Memuaskan)	(Memuaskan)	(Memuaskan)	(Memuaskan)

Sumber: Dr. Soetomo Tahun 2018

Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, uraian secara singkat hasil evaluasi dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Belum sempurnanya Peta Proses Bisnis yang merupakan mekanisme atau alur dari pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi memenuhi tujuan organisasi, (2) Perjanjian Kinerja harus mengacu pada Renstra, selaras dengan tugas dan fungsi, menggambarkan isu strategis yang berkembang dan menjawab permasalahan yang teridentifikasi saat proses perencanaan. Rencana Aksi yang disusun merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja, (3) Evaluasi atas program harus dilakukan dalam rangka menyimpulkan keberhasilan dan ketidakberhasilan program, dan (4) Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja agar digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan dipakai dasar reward dan punishment. Perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SIKAP 2015-2018 adalah perlunya integrasi perencanaan hingga evaluasi yang tercantum dalam Renstra, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, dan dokumen lainnya sehingga dokumen satu dengan lainnya selaras dan menjawab permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi pada saat proses perencanaan.

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif. Melalui pengawasan *intern* dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Disaat kondisi sekarang ini mendorong rumah sakit umum daerah yang dulu merupakan *cost centre*, dimana semua biaya operasional rumah sakit umum daerah dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kini rumah sakit umum daerah harus memadukan orientasi *service public oriented* dan *profit oriented* (Prasetyono dan Nurul, 2008). Hal ini bertujuan agar beban anggaran daerah dan pusat dapat dikurangi atau bahkan apabila memungkinkan Rumah sakit daerah menjadi salah satu lembaga penghasil sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan rumah sakit yang profesional menuju terciptanya suatu lembaga publik yang berorientasi pada *value for money*.

*Value for Money* dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*) dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang

bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, Sehingga penting untuk diimplementasikan.

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik, tentu tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri maupun lembaga pengawas khusus lainnya yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara internal yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, kendala laporan keuangan di sektor pemerintah, serta ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Apakah Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Daerah? dan (2) Apakah Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Daerah?, Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, (2) Untuk menguji pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

## TINJAUAN TEORETIS

### Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Haryanto *et al.*, (2017: 1) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Menurut Halim dan Kusufi (2018: 3) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Jenis-jenis organisasi yang memakai akuntansi sektor publik, sebagai berikut: (1) pemerintah pusat dan daerah, (2) organisasi nirlaba milik pemerintah dan (3) organisasi nirlaba milik swasta. Karakteristik pada akuntansi sektor publik berdasarkan perbedaan lingkungan yang meliputi lingkungan ekonomi, politik, kultural, dan demografi. Elemen-elemen yang ada pada akuntansi sektor publik, sebagai berikut: (1) perencanaan publik, (2) penganggaran publik, (3) realisasi anggaran publik, (4) pengadaan barang dan jasa publik,

(5) pelaporan keuangan sektor publik, (6) audit sektor publik, dan (7) pertanggungjawaban publik. Indikator akuntansi sektor publik meliputi: (1) transaksi, (2) analisis bukti transaksi, (3) pencatatan data transaksi, (4) pengikhtisaran, dan (5) pelaporan.

### **Pengawasan Internal**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjadikan bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2016: 133). Menurut Siagian dikutip Kadarisman (2013: 172) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2018: 370) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal. Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan dengan suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melakukan tugas dan fungsinya dengan berhasil.

Tujuan pengawasan internal, sebagai berikut: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (3) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Indikator pengawasan internal meliputi: (1) organisasi, (2) kebijakan, (3) prosedur, (4) personalia, (5) akuntansi, (6) penganggaran, dan (7) pelaporan.

### **Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Istilah kinerja berasal dari *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2015: 67). Menurut Prawirosentono (2008:2) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja ialah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang ataupun sekelompok orang didalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki beberapa manfaat, yakni sebagai berikut: (1) Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, (2) Untuk dapat memastikan tercapainya skema kinerja yang telah disepakati, (3) Mengidentifikasi kepuasan pelanggan sudah terpenuhi atau belum, (4) Untuk dapat memastikan pemahaman para pelaksana serta memastikan ukuran yang akan digunakan untuk mencapai kinerja, (5) Sebagai alat komunikasi untuk dapat memperbaiki kinerja organisasi, dan (6) Untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Indikator dari kinerja instansi pemerintah daerah meliputi: (1) ekonomi, (2) efisiensi, dan (3) efektivitas.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto *et al*, 2017:1).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik. Laporan yang dibuat kemudian diaudit untuk mengetahui kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub> : Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Simbolon, 2013: 61).

Manfaat yang utama diperoleh dari pengawasan intern yaitu membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang dapat dipercaya, dan dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dan terhindar dari hal yang merugikan. Sedangkan tujuan diadakannya pengawasan internal adalah untuk mencapai tingkatan kinerja yang telah direncanakan, menjamin susuna birokrasi yang baik dalam operasi unit-unit pemerintahan daerah baik secara internal maupun eksternal untuk memperoleh perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan serta memberikan perlindungan publik dari penyalahgunaan wewenang; serta mengendalikan agar administrasi pemerintah dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan paparan diatas didapat hipotesis, sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh antara kedua variabel tersebut maka penulis menggunakan metode asosiatif kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat, jadi disini terdapat variabel yang mempengaruhi (variabel dependen) dan variabel yang dipengaruhi (variabel independen) (Sugiyono, 2016).

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di RSUD Dr. Soetomo.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat diteliti. Teknik pengambilan sampel yaitu responden yang akan dijadikan sebagai sampel mengacu pada jumlah populasi yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Alasan menggunakan teknik purposive sampling karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Teknik purposive sampling menentukan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian. Objek yang digunakan adalah pegawai yang bekerja di RSUD Dr. Soetomo Kota Surabaya yang bertempat pada bagian Akuntansi Aset, Sistem Pengendalian Internal, Perencanaan 2 Evaluasi. Dalam menentukan kriteria didasari alasan objek tersebut merupakan responden yang dianggap sanggup untuk menggambarkan keseluruhan kinerja instansi pemerintah daerah di RSUD Dr. Soetomo.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara kuesioner atau angket, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden sehingga responden diharapkan memiliki kemampuan untuk menjawab yang ditanyakan oleh peneliti. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data tertulis yang dijawab oleh responden (Sekaran, 2006:82). Pengisian kuisisioner dilakukan secara langsung oleh responden dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada jawaban yang telah disediakan

Teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada

pegawai (responden) di seluruh organisasi pemerintahan. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner dengan model *skala likert* untuk menunjukkan persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan dengan skor sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Model Skala Likert**

No.	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2016)

## Definisi Operasional Variabel

### Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja instansi pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2009: 21) Ada beberapa indikator yang mendasari yaitu: (1) Perencanaan tahunan, (2) Perencanaan anggaran, (3) Penyusunan dokumen perjanjian kinerja, (4) Pengukuran kinerja, (5) Pelaporan akuntabilitas kinerja, (6) Membuat laporan evaluasi kinerja instansi pemerintah, (7) Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, (8) Mengendalikan kegiatan telah sesuai dengan indikator kinerja, (9) Mengkoordinir setiap perubahan yang ada, (10) Sakip sebagai bahan pertimbangan, dan (11) Laporan akuntabilitas sebagai bahan pertimbangan.

### Variabel Independen

Adalah variabel terukur atau tidak terukur yang berfungsi memengaruhi perubahan variabel dependen dalam suatu persamaan.

### Akuntansi Sektor Publik

Penerapan akuntansi sektor publik adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan standar yang telah ditetapkan telah terealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak telah berkerja sesuai standar yang berlaku. Menurut Santoso dan Pambelum (2008) siklus akuntansi keuangan sektor publik bisa diukur dengan: (1) Entitas Pelaporan, (2) Asumsi Dasar, (3) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, (4) Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, (5) Keandalan informasi yang Relevan dan Andal. (6) Unsur Laporan Keuangan, dan (7) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.

### Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan selektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Menurut Sawyer (2005) indikator yang dapat digunakan manager untuk mengontrol fungsi di dalam perusahaan adalah: (1) Akurat, (2) Jujur dan objektif, (3) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, (4) Berorientasi pada hal-hal yang strategis dan pada hasil-hasil, (5) Konsisten dengan struktur organisasi, (6) Luwes, (7) Objektif dan komprehensif, (8) Tegas, dan (9) Realistis secara ekonomis.



## **Teknik Analisis Data**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2012: 199) analisis statistik deskriptif adalah analisis data statistik yang digunakan dengan cara mendeskripsikan suatu data yang telah dikumpulkan. Analisis ini merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakter responden mengenai pertanyaan atau pernyataan kuesioner yang berkaitan tentang variabel yang diteliti: akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kinerja instansi pemerintah daerah yang akan disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif dalam SPSS.

### **Uji Instrumen**

#### **Uji Validitas**

Suatu instrumen dalam penelitian dapat dikatakan valid maka hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017: 198). Ghozali (2016: 53) juga menentukan pengukuran uji validitas, yaitu: (1) Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka pertanyaan dinyatakan valid, dan (2) jika  $r$  hitung  $\leq$   $r$  tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu pengukuran dikatakan bebas kesalahan karena dapat menjamin pengukuran yang valid dan konsisten. Alat pengukur hasil uji reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Hasil uji dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel  $>$  0,60 (Ghozali, 2016: 43).

#### **Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan dari model regresi dalam memprediksi keterkaitan atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini juga digunakan untuk mengetahui kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasinya dan tidak bias.

#### **Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016: 154) uji normalitas yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji model regresi variabel yang diteliti apakah berdistribusi normal atau tidak menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Jika probabilitas  $>$  0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal, dan (2) Jika probabilitas  $<$  0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

#### **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen dalam model regresi Ghozali (2016: 103). Apabila telah diuji lalu ditemukan terjadi korelasi maka terdapat problem multikolinieritas. Untuk mengetahui terjadinya problem multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Apabila angka *tolerance* dari suatu model regresi kurang dari 0,1 serta VIF  $>$  10 hal tersebut mengartikan terdapat problem multikolinieritas.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi, serta menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan deviasi standar nilai pada variabel dependen di setiap variabel independennya dalam suatu model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik plot atau scatterplot.

Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang teratur maka dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas. Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang menyebar diatas dan di bawah angka nol sumbu Y maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134).

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntansi Sektor Publik (ASP) dan Pengawasan Internal (PI) sedangkan variabel terikat atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Instansi Pemerintah daerah (KIP). Menurut Sugiyono (2016) analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya, analisis ini dilakukan saat suatu penelitian terdapat minimal dua variabel independennya. Formulasi persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KIP = \alpha + \beta_1 ASP + \beta_2 PI + e$$

Keterangan

KIP	: Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas
ASP	: Akuntansi Sektor Publik
PI	: Pengawasan Internal
e	: Standar Error

### **Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Kriteria pengujian sebagai berikut: (1)  $PValue < 0,05$  menunjukkan bahwa uji kelayakan model layak dan fit untuk digunakan pada penelitian, dan (2)  $PValue > 0,05$  menunjukkan bahwa uji kelayakan model tidak layak dan fit untuk digunakan pada penelitian.

### **Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kuat atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat R<sup>2</sup> yang diperoleh mendekati satu. Apabila nilai R<sup>2</sup> mendekati nol maka semakin lemah hubungan antara keduanya. Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen yaitu yang memiliki nilai mendekati satu (Ghozali, 2016: 95).

### **Uji Hipotesis (Uji T)**

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh pada setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependennya (Ghozali (2016:99). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: (1)  $PValue > 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, dan (2)  $PValue \leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Perhitungan dilakukan dengan mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total dengan menggunakan analisis korelasi Pearson. Kriteria pengujian adalah jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,361$ , maka menunjukkan indikator tersebut valid untuk mengukur konstruk yang dimaksud berarti dan dinyatakan sah sebagai alat pengumpul data. Adapun hasil dari uji validitas sebagaimana hasil yang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Validitas**

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	r tabel	Keterangan
Akuntansi Sektor Publik (ASP)	ASP1	0,664	0,361	Valid
	ASP2	0,629	0,361	Valid
	ASP3	0,754	0,361	Valid
	ASP4	0,661	0,361	Valid
	ASP5	0,764	0,361	Valid
	ASP6	0,642	0,361	Valid
	ASP7	0,403	0,361	Valid
Pengawasan Internal (PI)	PI1	0,793	0,361	Valid
	PI2	0,717	0,361	Valid
	PI3	0,601	0,361	Valid
	PI4	0,830	0,361	Valid
	PI5	0,843	0,361	Valid
	PI6	0,716	0,361	Valid
	PI7	0,828	0,361	Valid
	PI8	0,862	0,361	Valid
	PI9	0,780	0,361	Valid
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (KIPD)	KIPD1	0,495	0,361	Valid
	KIPD2	0,366	0,361	Valid
	KIPD3	0,645	0,361	Valid
	KIPD4	0,413	0,361	Valid
	KIPD5	0,721	0,361	Valid
	KIPD6	0,678	0,361	Valid
	KIPD7	0,655	0,361	Valid
	KIPD8	0,711	0,361	Valid
	KIPD9	0,609	0,361	Valid
	KIPD10	0,621	0,361	Valid
	KIPD11	0,572	0,361	Valid

Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022.

Berdasarkan hasil pengujian validitas instrument didapatkan hasil bahwa semua indikator menghasilkan nilai koefisien korelasi lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,361$ . Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

### Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Instrumen digunakan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji digunakan *Cronbach Alpha*. Dimana suatu instrumen akan semakin reliable apabila koefisien alpha lebih dari 0.70. Adapun rangkuman hasil uji reliabilitas kuisioner pada semua item valid sesuai dengan Output SPSS dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

Indikator	<i>Cronbach Alpha</i>
Akuntansi Sektor Publik (ASP)	0,762
Pengawasan Internal (PI)	0,911
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (KIPD)	0,805

Sumber: Laporan Keuangan diolah, 2022.

Berdasarkan Tabel 4 diatas, diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada semua variabel dalam penelitian ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* yang lebih dari dari 0,600, sehingga semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian ini dinyatakan konsisten, handal, dan layak dipergunakan sebagai alat pengumpul data.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

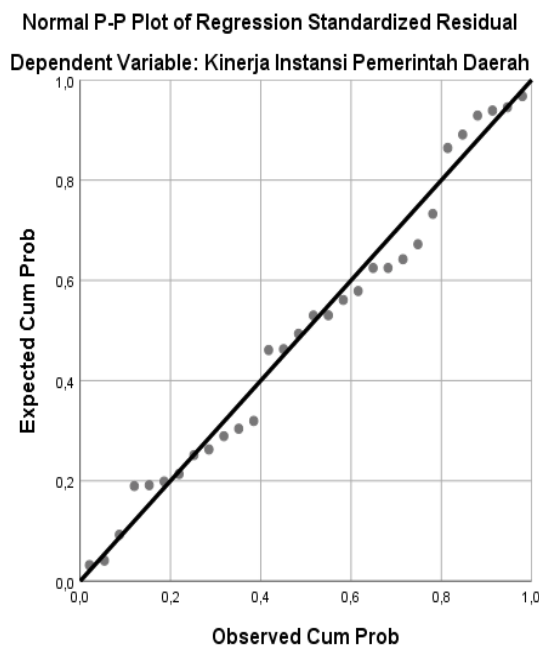
Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual berdistribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian *Kolmogorov Smirnov* dan *Normal Probability Plot* (P-P Plot). Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai probabilitas *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari nilai significant alpha 5% atau 0,05 dan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan pada *Normal Probability Plot* (P-P Plot), penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi normalitas melalui pengujian *Kolmogorov Smirnov* dan *Normal Probability Plot* pada Tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

<i>Kolmogorov Smirnov</i>	Probabilitas
0,089	0,200

Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022.

Berdasarkan Tabel 5 diatas, uji normalitas menghasilkan probabilitas statistik uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari nilai signifikan sebesar 5% atau 0,05 sehingga  $H_0$  diterima. Hal ini berarti residual pada model dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi. Uji normalitas juga dapat di uji dengan grafik *Normal Probability Plot* pada Gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1**  
**Grafik Normal Probability Plot**  
**Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022**

Berdasarkan Gambar 1 diatas, menunjukkan bahwa semua plot-plot data searah mengikuti garis diagonal, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

**Uji Multikolinearitas**

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Pada analisis regresi linier tidak diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF masing-masing variabel independen. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. Adapun ringkasan hasil pengujian multikolinieritas sebagaimana Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Pengujian Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Akuntansi Sektor Publik	0,821	1,218
Pengawasan Internal	0,821	1,218

**Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022**

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dikethui bahwa semua variabel bebas menghasilkan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas. Sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pada analisis regresi diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilihat melalui

*Breusch Pagan Test* dan grafik scatterplot. Hipotesis pengujian asumsi heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: (1)  $H_0$  : Residual memiliki ragam homogen, (2)  $H_1$  : Residual tidak memiliki ragam homogen.

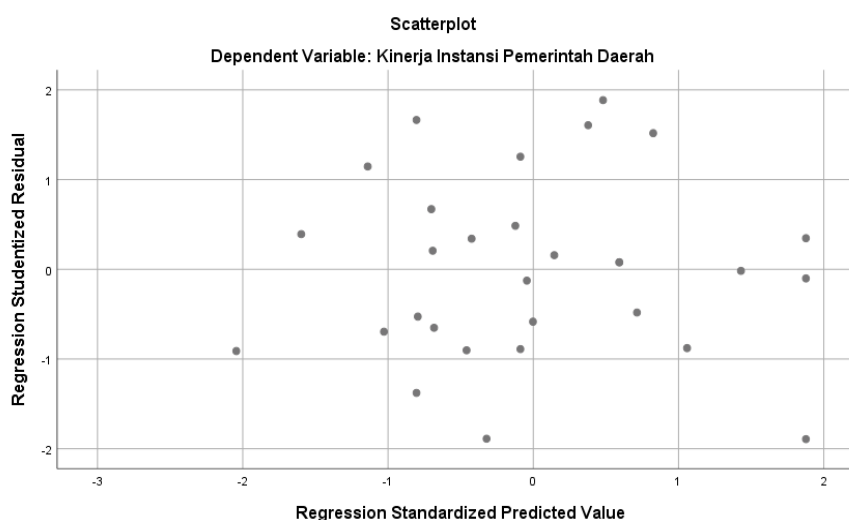
Kriteria pengujian menggunakan *Breusch Pagan Test* menyatakan apabila semua nilai signifikansi dari variabel independen  $\geq$  level of significant ( $\alpha=5\%$ ) maka residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Kemudian jika menggunakan grafik scatterplot apabila titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau acak maka residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas melalui *Breusch Pagan Test* berikut ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Chi-Square	Df	Sig.
0,069	1	0,793

Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa pada model menghasilkan signifikansi lebih besar dari nilai signifikan sebesar  $\alpha=5\%$  atau 0,05. Hal ini berarti residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Uji heteroskedastisitas juga dapat diukur dengan scatterplot yang terdapat pada Gambar 2 berikut ini:



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Hteroskedastisitas**  
Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022

Berdasarkan Gambar 2 diatas, titik-titik menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, dan juga penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali sehingga residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hasil dari pengujian Regresi terdapat pada Tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien	T Statistics	Sig.
(Constant)	1,727	3,503	0,002
Akuntansi Sektor Publik	0,398	3,307	0,003
Pengawasan Internal	0,243	3,014	0,006

Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 8 diatas maka persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$KIPD = 1,727 + 0,398 ASP + 0,243 PI$$

Nilai konstanta (a) sebesar 1,727 yang menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari akuntansi sektor publik dan pengawasan internal bernilai sama dengan (0) maka kinerja instansi pemerintah daerah mengalami peningkatan. Variabel Akuntansi Sektor Publik memiliki  $\beta$  sebesar 0,398 sehingga apabila setiap 1 kenaikan pada variabel Akuntansi Sektor Publik, maka nilai kinerja instansi pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,398. Variabel Pengawasan Internal memiliki  $\beta$  sebesar 0,243 sehingga apabila setiap 1 kenaikan pada variabel Pengawasan Internal maka nilai kinerja instansi pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,243.

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu sebesar 5% atau 0,05, maka dinyatakan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Pengujian signifikansi secara simultan dapat diketahui melalui ringkasan pada Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji F**

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,655	2	0,828	17,324	0,000
Residual	1,290	27	0,048		
Total	2,945	29			

Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 9 diatas, menghasilkan nilai F hitung sebesar 17,324 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu sebesar  $\alpha=5\%$  atau 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal secara simultan atau bersama-sama terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya keragaman variabel independen dalam menjelaskan keragaman variabel dependen, atau dengan kata lain untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien Determinasi dalam analisis Regresi dilambangkan dengan R<sup>2</sup>. Hasil pengujian ini terdapat pada Tabel 10 berikut ini:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,750	0,562	0,530

Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 10 diatas, nilai R-square pada model bernilai 0,562 atau 56,2%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel Kinerja Instansi Pemerintah Daerah mampu dijelaskan oleh variabel Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal sebesar 56,2% atau dengan kata lain kontribusi pengaruh variabel Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebesar 56,2%, sedangkan sisanya sebesar 43,8% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai sinifikansi yaitu sebesar 5% atau 0,05, maka dinyatakan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil ini terdapat pada Tabel 11 berikut ini:

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Hipotesis**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,727	,493	3,503	,002
	Akuntansi Sektor Publik	,398	,120	,465	,307
	Pengawasan Internal	,243	,081	,424	,006

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sumber: Laporan Keuangan, diolah 2022

Berdasarkan hasil pada Tabel 11 diatas, dapat diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah sebesar 3,307 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari *significant alpha* 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien yang dihasilkan sebesar 0,398 (positif) yang artinya bahwa apabila semakin baik Akuntansi Sektor Publik maka cenderung meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sehingga hipotesis 1 yang menyatakan "adanya pengaruh positif dan signifikan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah" diterima. Berdasarkan hasil pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah sebesar 3,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari *significant alpha* 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien yang dihasilkan sebesar 0,243 (positif) yang artinya bahwa apabila semakin baik Pengawasan Internal maka cenderung meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sehingga hipotesis 2 yang menyatakan "adanya pengaruh positif dan signifikan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah" diterima.



## **Pembahasan**

### **Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Menurut Halim dan Kusufi (2018:3) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pada saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto *et al.*, 2017:1).

Berdasarkan hasil pada penelitian ini diketahui bahwa responden cenderung menilai bahwa tempat mereka bekerja memiliki Akuntansi Sektor Publik (ASP) yang sangat baik terutama pada kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien yang dihasilkan positif, artinya bahwa apabila semakin baik Akuntansi Sektor Publik maka cenderung meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik. Laporan yang dibuat kemudian diaudit untuk mengetahui kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pada penelitian ini setara dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikrami (2021) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah". Hasil penelitian Ikrami menyatakan bahwa Penerapan Standart Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

### **Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu manfaat dari pengawasan internal adalah dapat membantu menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang dapat dipercaya, dan dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Sedangkan tujuan diadakannya pengawasan internal adalah untuk mencapai tingkatan kinerja yang telah direncanakan, menjamin susunan birokrasi yang baik dalam operasi unit-unit pemerintahan daerah baik secara internal maupun eksternal untuk memperoleh perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan serta memberikan perlindungan publik dari penyalahgunaan wewenang; serta mengendalikan agar administrasi pemerintah dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil pada penelitian ini diketahui bahwa responden cenderung menilai bahwa tempat mereka bekerja memiliki pengawasan internal yang baik terutama pada tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan pengawasan internal ditetapkan secara tertulis. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien

yang dihasilkan positif, artinya bahwa apabila semakin baik pengawasan internal maka cenderung meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil pada penelitian ini setara dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2019) berjudul "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah".. Hasil penelitian Sartika (2019) menyatakan bahwa Pengawasan Internal Berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien yang dihasilkan positif, artinya bahwa apabila semakin baik Akuntansi Sektor Publik maka cenderung meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan (2) Terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien yang dihasilkan positif, artinya bahwa apabila semakin baik pengawasan internal maka cenderung meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

### **Keterbatasan**

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang membuat penelitian belum mencapai sempurna, berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang dijabarkan, berikut terdapat keterbatasan yang nantinya menjadi perbaikan di masa yang akan datang: (1) Sumber data penelitian ini diperoleh dari kuesioner, terkadang responden tidak memberikan pendapat yang sebenarnya karena beberapa faktor, seperti kejujuran, pola pikir, dan pemahaman responden pada saat pengisian kuesioner yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti, dan (2) Pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada saat terjadinya pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat secara langsung bertemu dengan responden, membuat peneliti tidak bisa mengontrol kebenaran pengisian kuesioner secara langsung.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka terdapat saran yang direkomendasikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi Peneliti: (1) Bagi instansi pemerintah daerah khususnya RSUD Dr. Soetomo diharapkan mampu meningkatkan kinerja instansi dengan meningkatkan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal. Dikarenakan hal tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja. Khususnya dibagian penanganan kendala informasi yang terjadi dan keikutsertaan satuan pengawasan internal dalam penyusunan prosedur-prosedur pemerintahan, dan (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel lain yang diduga mempengaruhi kinerja instansi selain akuntansi sektor publik dan pengawasan internal. Hal tersebut dikarenakan masih ada sisa 43,8% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, I. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. In: *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2018. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryanto., Sahmuddin., dan Arifuddin. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ikrami, F. 2021. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mangkunegara, A. P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, 1-52. Yogyakarta
- Prasetyono dan K. Nurul. 2008. Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Berdasarkan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Akuntabilitas Publik (Survei Pada Rumah Sakit Daerahdi Jawa Timur). *Jurnal SNA XI*.
- Prawirosentono, S. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPFE. Yogyakarta.
- Santoso, U. dan Y. J. Pambeleum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Sartika. 2019. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Sawyer, D. S. C. 2005. *Internal Auditing*, Buku Satu, Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Simbolon, M. M. 2013. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Yahya, Y. 2016. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu. Yogyakarta.